

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah peran krusial Asas *Cabotage* dan *Nationality Rules* dalam membentuk investasi penerbangan global. Dengan studi kasus utama di Indonesia, rumusan masalah berfokus pada bagaimana penerapan kedua asas ini dalam hukum nasional, jika dibandingkan dengan negara lain, telah memengaruhi struktur pasar domestik, daya tarik *Foreign Direct Investment* (FDI), dan menciptakan paradoks biaya perjalanan yang tinggi di tengah ketergantungan masyarakat pada konektivitas udara.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif yang diperkaya dengan analisis komparatif global terhadap praktik di Amerika Serikat, Uni Eropa, Chile, dan kawasan ASEAN. Analisis ini menunjukkan adanya kontras yang tajam dalam penerapan kebijakan antar negara.

Adapun hasil penelitian menemukan bahwa kepatuhan ketat Indonesia pada larangan *Cabotage* dan batas kepemilikan asing 49% telah menciptakan pasar oligopoli yang terkonsentrasi. Struktur ini berkorelasi langsung dengan tingginya harga tiket domestik dan terbatasnya pilihan konsumen. Disimpulkan bahwa kebijakan proteksionis ini sudah usang dan menimbulkan biaya ekonomi yang signifikan. Berdasarkan analisis komparatif tersebut, penelitian ini merekomendasikan strategi liberalisasi bertahap bagi Indonesia, termasuk uji coba *Cabotage* pada rute yang kurang terlayani, mereformasi aturan kepemilikan asing, dan mengalihkan fokus dari pengendalian harga ke pengurangan biaya struktural. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, kesejahteraan konsumen, dan membuka potensi ekonomi sektor penerbangan secara penuh.

Kata Kunci: *Cabotage, Nationality Rules, Aviation Investment*

ABSTARCT

This research is set against the background of the crucial role of the Cabotage Principle and Nationality Rules in shaping global aviation investment. Focusing on Indonesia as a primary case study, the research problem centers on how the application of these two principles in national law, when compared with other countries, has influenced the domestic market structure, its attractiveness for Foreign Direct Investment (FDI), and created the paradox of high travel costs amidst the public's dependence on air connectivity.

The research method used is a juridical-normative approach, enriched by a comparative global analysis of practices in the United States, the European Union, Chile, and the ASEAN region. This analysis reveals a sharp contrast in the application of these policies between nations.

The findings indicate that Indonesia's strict adherence to a prohibition on Cabotage and a 49% foreign ownership limit has created a concentrated, oligopolistic market. This structure directly correlates with high domestic airfares and limited consumer choice. It is concluded that these protectionist policies are outdated and impose significant economic costs. Based on this comparative analysis, the research recommends a phased liberalization strategy for Indonesia, including piloting Cabotage on underserved routes, reforming foreign ownership rules, and shifting the policy focus from price controls to reducing structural costs. These reforms aim to enhance connectivity, consumer welfare, and unlock the full economic potential of the aviation sector.

Kata Kunci: *Cabotage, Nationality Rules, Aviation Investment*